

Komunikasi Politik Etnis Tionghoa dalam Mengungkap Identitas Relasi Sosial dan Politik (Studi pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan)

Taufik Hidayat^{*)}

*Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
Koresponden: muhammad.hdyt@gmail.com*

ABSTRAK

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma dramaturgi Erving Goffman dan etnik situasional Fredrik Barth dan tidak terlepas dari dukungan teori meskipun peneliti kualitatif beranggapan bahwa mereka justru harus membebaskan dirinya dari "tawanan suatu teori". Analisis dilaksanakan sepanjang penelitian berlangsung, data dikategorikan dan diklasifikasikan sesuai dengan tema dan model. Untuk menjaga keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan konfirmasi dengan mendatangi kembali informan setelah hasil wawancara sebelumnya diklasifikasi berdasarkan fokus penelitian. Kesimpulan penelitian bahwa prinsipnya para anggota DPRD Kota Medan periode 2009-2014 dari etnik Tionghoa memiliki motivasi yang sama dalam mencalonkan diri, yakni untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan etnik Tionghoa. Bentuk komunikasi politik yang umum dipergunakan oleh para anggota DPRD Kota Medan periode 2009-2014 adalah dialog, tatap muka dan kunjungan. Dalam menerapkan strategi dramaturgi dalam pengelolaan panggung, terdapat beragam atribut dan simbol simbol yang menjadi pembeda untuk mengidentifikasi identitas etnis Tionghoa sebagai anggota DPRD Kota Medan.

Kata Kunci : Dramaturgi, Komunikasi Politik, Tionghoa

ABSTRACT

This study uses qualitative research methods with the dramaturgy paradigm Erving Goffman and the ethnic situational Fredrik Barth and is inseparable from the support of theory even though qualitative researchers assume that they should free themselves from the "prisoners of a theory". The analysis was carried out throughout the study, the data was categorized and classified according to themes and models. To maintain the validity of the data obtained, researchers confirm by revisiting informants after the results of previous interviews are classified based on the focus of the study. The conclusion of the research is that the principle of the 2009-2014 Medan City DPRD members from the ethnic Chinese has the same motivation in running for, namely to fight for the aspirations and interests of the ethnic Chinese. The forms of political communication that are commonly used by Medan City DPRD members for the 2009-2014 period are dialogue, face-to-face and visits. In implementing the dramaturgy strategy in stage management, there are various attributes and symbols that make a difference to identify the ethnic Chinese identity as members of the Medan City DPRD.

Keywords: Dramaturgy, Political Communication, Chinese

Pendahuluan

Komunikasi politik merupakan urat nadi proses politik yang senantiasa dilakukan oleh kalangan politikus maupun partai politik untuk mencapai tujuan politik tertentu. Oleh karena itu, komunikasi politik sangat berpengaruh pada suatu sistem politik yang mana sistem politik yang sehat harus didukung oleh komunikasi politik yang dilakukan oleh kalangan politisi dan partai-partai politik. Fungsi komunikasi politik antara lain adalah untuk menyerap berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan (Sastroadmodjo, 1995: 45).

Kemampuan berkomunikasi politik secara personal juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan individu meraih kepercayaan calon pemilih (konstituen) untuk memilihnya menjadi anggota dewan sesuai dengan orasi politik, lobi dan pendekatan politik yang dilakukannya. Komunikasi politik juga sangat berperan dalam mengidentifikasi identitas etnik dimana identifikasi identitas etnik yang lazim dilakukan pada masyarakat multietnik selalu diarahkan pada situasi dan konteks dimana seseorang berada.

Mengidentifikasi seseorang menurut etniknya merupakan bagian dari perilaku dan tindakan komunikasi baik dalam aktifitas dan peran politik maupun dalam kehidupan sosial secara umum, terutama dalam rangka menarik simpati calon pemilih, meningkatkan popularitas maupun untuk mencapai tujuan politik lainnya. Kondisi demikian sesuai dengan apa yang diasumsikan Fredrik Barth dalam Mulyana (2002:87) sebagai *situational ethnicity*. Dalam konteks lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), identifikasi identitas etnik menjadi hal penting dalam aktivitas politik. Identitas etnik adalah sesuatu yang problematik ketika dihadapkan dengan komunikasi politik, terutama dalam sistem pemilu yang demokratis. Hal tersebut bisa menjadi pembeda atau ko-identifikasi bagi pihak yang menggunakannya untuk tujuan meraih dukungan politik.

Tujuan identifikasi identitas etnik secara personal adalah untuk mengangkat citra diri dan popularitas politisi yang bersangkutan dan secara kelompok akan memupuk penerimaan khalayak terhadap partai tempat dimana politisi tersebut bergabung. Identitas etnik dan politik hampir sulit dipisahkan. Hal ini berarti keberagaman seseorang lebih banyak dipengaruhi keturunan dan lingkungan, bukan pilihan bebas. Tempat lahir, warna kulit, bahasa, dan agama merupakan realitas primordial yang diterima seseorang, bukan karena hasil usahanya sendiri. Begitu pula pilihan politik, hubungan kekerabatan, dan faham keagamaan sangat signifikan pengaruhnya. Misalnya, warga Melayu di Malaysia, kalau tidak beragama Islam akan dianggap khianat terhadap identitas etniknya (Hidayat, 2007:59). Wacana etnik banyak muncul pada wilayah yang heterogen di Indonesia seperti Riau Kepulauan, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara. Diantara wilayah-wilayah tersebut, isu-isu etnisitas yang berkembang dalam pemilu atau pilkada juga beragam, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah isu agama cukup menonjol. Sementara di wilayah lain isu yang menonjol adalah isu etnik, pendatang dan putra daerah. Sentimen etnik seringkali dinilai sebagai salah satu kekuatan sekaligus problematika dalam arena demokrasi. Tidak terkecuali pada kontestasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

Etnisitas sebagai salah satu kategori dalam sosiologi politik berkembang seiring dengan perubahan pola politik identitas. Salah satu alat analisis dalam memahami identitas etnik seseorang dalam komunikasi politik adalah perspektif *situational ethnicity* yang dikembangkan Fredrik Barth. Pendekatan Barth tentang identitas etnik sebenarnya didasari oleh konsep-konsep penelitian sosial yang dikembangkan dari perspektif interaksionisme simbolik. Buchigani dalam Mulyana (2006:76) menyatakan bahwa perspektif Barth adalah perpanjangan dari pendekatan Goffman tentang konsep diri secara kultural. Suatu pandangan interaksionisme simbolik menyatakan bahwa konsep identitas etnik terletak pada teori-teori kontemporer tentang diri. Dalam konteks politik, hal ini menjadi menarik karena citra diri menjadi sangat penting dalam mencapai sukses baik dalam upaya mempengaruhi publik maupun dalam melaksanakan peran-peran politik. Situasi multietnik dan adanya beragam identitas yang dimiliki memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan dalam identitas keetnikan seseorang. Di kota Medan, etnis Tionghoa memperlihatkan karakteristik tersendiri dalam menjalankan peran politik dan sosialnya. Hal ini sangat nyata terlihat melalui gairah politik etnik Tionghoa dalam pemilu legislatif April 2009 di Sumatera Utara khususnya di Medan.

Diperkirakan ada sekitar 60 orang calon legislatif warga Tionghoa baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang berpartisipasi politik dalam pemilu legislatif tahun 2009 tersebut. Alasan meningkatnya komunikasi politik ini antara lain adalah adanya keinginan untuk mengintegrasikan pengabdian sosial ekonomi yang telah dicapai selama

ini dengan pengabdian politik melalui politik formal. Dengan kata lain, pencalonan etnik Tionghoa untuk duduk di dewan bukanlah dalam rangka memperjuangkan kepentingan kesukuan, namun sebagai bentuk partisipasi politik atau perwujudan semangat pengabdian untuk kemaslahatan dan dapat dinikmati masyarakat luas. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI dan UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan etnik, telah menjadi “angin segar” bagi WNI keturunan Tionghoa. Setelah era reformasi berjalan hingga 13 tahun lebih, eksistensi etnik Tionghoa sudah selangkah optimal dalam bidang politik.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam etnik Tionghoa yang terlibat dalam struktur kepengurusan partai politik, menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah. Identifikasi diri sebagai bagian dari etnik lokal atau sebaliknya sebagai etnik pendatang sangat penting dalam konteks politik lokal saat ini. Simbol-simbol etnik menjadi salah satu bagian penting dalam proses interaksi antara masyarakat yang berbeda etnik.

Simbol-simbol dan atribut etnik menjadi pembeda bagi siapa saja dalam interaksi sosial, termasuk dalam hal bagaimana seseorang menjalani peran-peran politik. Ini berarti bahwa seorang politisi juga menghadapi situasi yang sama dalam interaksi mereka dalam masyarakat. Aktifitas komunikasi politik sebagai kunci keberhasilan seseorang dalam meraih sukses dalam peran politik tentu saja harus menggunakan identitas etnik tersebut untuk memperluas penerimaan masyarakat. Di dalamnya termasuk, bagaimana seseorang politisi (anggota DPRD) mempertukarkan simbol-simbol dengan rekan-rekan mereka untuk mencapai tujuan politiknya.

Penelitian ini merupakan kajian identitas etnik dalam konteks komunikasi politik. Kajian ini berusaha mengungkap mekanisme atau proses komunikasi politik anggota DPRD Kota Medan dalam peran politiknya. Apakah dengan simbol simbol, atribut, setting dan peran-peran tertentu yang dipilih atau dibentuk dan dipergunakan ketika mengidentifikasi ciri identitas diri dan etniknya. Hal mana tentu saja identitas tersebut dapat bersifat politis, mana yang ditonjolkan, disembunyikan atau dimanipulasi untuk tujuan yang diharapkan komunikator politik bersangkutan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang komunikasi politik etnik Tionghoa dalam relasi sosial dan politik di kota Medan, penulis melakukan penelitian dengan judul: **Komunikasi Politik Etnik Tionghoa Dalam Mengungkapkan Identitas Relasi Sosial dan Politik (Studi terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan)** dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa motivasi para anggota DPRD Kota Medan dari etnik Tionghoa untuk berpartisipasi dalam pileg 2009-2014?, 2). Bagaimana bentuk komunikasi politik yang diterapkan para anggota DPRD Kota Medan dalam berorasi politik untuk meraih simpatik dari konstituennya? Dan 3). Bagaimana strategi dramaturgi pengelolaan panggung yang dilakukan para anggota DPRD Kota Medan melalui penggunaan atribut, simbol dan tema politiknya sehingga berhasil meyakinkan para konstituen untuk memilih mereka? dan tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui Komunikasi Politik, motivasi anggota DPRD Kota Medan khususnya etnik Tionghoa dalam mengungkapkan identitas relasi sosial dan politik serta untuk mengetahui bentuk dramaturgi dan mengetahui keberhasilan komunikasi politik yang diterapkan.

Komunikasi Politik

Bagi seorang pemimpin politik, berkomunikasi merupakan cara untuk menjaga kelangsungan kepemimpinannya. Nimmo (2006) melihat politisi mencari pengaruh melalui komunikasi, karena bahwa pada akhirnya tujuannya adalah mempengaruhi opini orang lain. Lilleker (2006) juga berpendapat bahwa komunikasi antara pihak yang berkuasa dan masyarakat adalah suatu keniscayaan dan hal yang tak terpisahkan dalam proses politik apapun. Namun khususnya dalam pemerintahan yang demokratis, komunikasi politik amatlah krusial untuk membangun sebuah masyarakat, yang baik pemerintah maupun rakyatnya perlu merasa bahwa mereka terhubung satu sama lain, sehingga para pemimpin politik itu memang harus berkomunikasi tentang politik. Nimmo sebagaimana dikutip oleh Arrianie (2010:100), menelaah tentang perilaku komunikasi politik, dan makna yang diberikan terhadap perilaku itu. Nimmo mencatat ada berbagai perspektif mengenai komunikasi politik, yaitu: 1). Perspektif aksi diri: Bahwa di dalam diri manusia terdapat kekuatan berupa motif, sikap, dorongan, rangsangan,

maupun kapasitas, yang menentukan perbuatannya. 2). Perspektif interaksi: Bahwa terdapat berbagai kekuatan di luar manusia yang menentukan kelakuan manusia tersebut, yang mengimbangkan satu dengan yang lain, dan terjadilah hubungan sebab-akibat. Kekuatan tersebut antara lain adalah kedudukan sosial dan ekonomi, peran sosial, tuntutan kelompok, ketentuan larangan budaya, kebiasaan, dan hukum. 3). Perspektif transtraksi: Bahwa untuk memahami perbuatan manusia, dapat dipandang dari makna yang diberikan manusia terhadap hal-hal fisik. Hal ini karena makna diturunkan melalui transaksi yang dimiliki manusia dengan sesamanya.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa (Huntington, 1990:120). Menurut Surbakti (1999:120) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah 1). Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2). Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya. Berdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik yaitu, 1). Partisipasi politik aktif, jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi. 2). Partisipasi politik apatis, jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah. 3). Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi. 4). Partisipasi politik militant radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.

Identitas

Menurut Frederik Barth (1988) istilah etnik adalah suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Kelompok etnis adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan sadar akan kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri dan menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Identitas etnik terpisah dari identitas pribadi selaku individu, meskipun keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ada empat komponen utama identitas etnik: 1) Kesadaran etnik (*ethnic awareness*), seseorang menyadari memiliki etnik sendiri yang berbeda dengan kelompok lain; 2) Identifikasi diri etnik (*ethnic self-identification*), label yang diberikan pada kelompoknya sendiri; 3) Sikap etnik (*ethnic attitudes*), perasaan tentang dirinya dan kelompok lain; 4) Tingkah laku etnik (*ethnic behaviors*), pola-pola tingkah laku yang khas ada pada suatu kelompok etnik tertentu. Di Indonesia, identitas etnik seseorang jelas jika ia berasal dari ibu dan bapak etnik yang sama, berdiam di sebuah wilayah tertentu yang memang turun-temurun berdiam di situ, menggunakan bahasa daerah tertentu, beserta segala atribut-atribut budaya yang memang diakui menjadi miliknya dan diakui pula secara implisit atau eksplisit oleh etnik lain Weinreich (1985) dalam Mulyana (2007:120) menyebutkan bahwa identitas sosial termasuk identitas etnik merupakan penggabungan ide-ide, perilaku, sikap, dan simbol-simbol bahasa yang ditransfer dari generasi ke generasi melalui sosialisasi. Untuk itu, identitas etnik seseorang tidak berhenti ketika orang ditasbihkan sebagai anggota etnik tertentu melalui bukti 'darah'. Akan tetapi identitas itu terbentuk melalui sosialisasi dalam keluarga dan masyarakat lingkungannya. Seorang yang terlahir sebagai etnik bugis misalnya, tidak akan merasa memiliki identitas etnik bugis apabila tidak ada sosialisasi identitas terhadapnya.

Identitas politik adalah citra politik menurut Cangara (2009:134) yang merupakan visualisasi dari atribut yang diberikan dan dipersepsikan oleh pihak luar tentang seorang kandidat maupun partai politik. Citra politik dalam hal ini bisa berupa reputasi dan kredibilitas seorang kandidat maupun partai politik yang dipersepsikan oleh masyarakat luas. Semakin baik reputasi dan kredibilitas seorang kandidat maupun partai politik, maka akan semakin besar peluang untuk dipilih masyarakat dalam pemilihan umum. Identitas atau citra politik yang positif dari suatu partai politik maupun kandidat akan memberikan efek positif pula terhadap pemilih guna memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Dengan demikian, citra politik seseorang akan membantu dalam pemahaman, penilaian dan pengidentifikasian peristiwa, gagasan, tujuan atau pemimpin politik. Citra politik juga membantu bagi seseorang dalam memberikan alasan yang dapat diterima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir sebagaimana tampaknya tentang referensi politik. Relasi sosial dan politik etnik Tionghoa dalam penelitian ini erat kaitannya dengan identitas diri. Proses pencarian identitas diri di kalangan masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia menunjukkan suatu dinamika tersendiri.

Seandainya dibandingkan dengan keadaan orang-orang Tionghoa di beberapa negara tetangga seperti Philipina ataupun Thailand, dimana orang Tionghoa sudah berakulturasi dan menjadi warga pribumi, maka posisi etnis Tionghoa di Indonesia nampaknya belum menemukan format yang tepat. Walaupun orang Tionghoa sudah beranak cucu di bumi Indonesia selama ratusan tahun, namun sampai saat ini masih berkembang anggapan orang Tionghoa sebagai perantau, orang yang menumpang hidup dan cari makan di negeri orang. Orang Tionghoa juga menyandang label WNI lengkap dengan berbagai atribusi yang cenderung berkonotasi kurang menyenangkan. Sering diibaratkan orang Tionghoa hanya diterima di beranda depan rumah dan belum diterima di dalam rumah sebagai keluarga sendiri.

Etnik Tionghoa

Suku bangsa Tionghoa (biasa disebut juga Cina di Indonesia adalah salah satu etnik di Indonesia. Biasanya mereka menyebut dirinya dengan istilah Tenglang (Hokkien), Tengnang (Tiochiu), atau Thongnyin (Hakka). Dalam bahasa Mandarin mereka disebut Tangren ("orang Tang") atau lazim disebut Huaren. Disebut Tangren karena sesuai dengan kenyataan bahwa orang Tionghoa Indonesia mayoritas berasal dari Cina selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang, sementara orang Cina utara menyebut diri mereka sebagai orang Han. Istilah Tionghoa dan Tiongkok berasal dari kata kata dari bahasa Kanton, yaitu salah satu bahasa Cina, dan artinya adalah orang Cina dan Negara Cina. Istilah ini selalu dipakai oleh masyarakat Tionghoa sebelum 1965 (Suryadinata; 2002:23). Akan tetapi pada tahun itu, di Bandung dalam pertemuan internal ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menghasilkan keputusan menggunakan istilah 'Cina' ketika menggambarkan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, sehingga mengurangi atau menghapuskan perasaan 'inferior' dan 'superior'. Oleh karena alasan ini yang melatarbelakangi penggunaan istilah 'Cina', masyarakat keturunan Tionghoa merasa istilah ini adalah hinaan dan akibatnya ketika berbicara tentang masyarakatnya mereka memakai istilah Tionghoa dan merasa dihina ketika istilah orang Cina atau Cina dipakai (Suryadinata; 2002:123)

Dramaturgi Komunikasi Politik

Eugenio Barba (2005) mendefinisikan dramaturgi sebagai akumulasi aksi yang tidak terbatas pada gerakan-gerakan aktor, tetapi juga meliputi aksi-aksi yang terkait dengan adegan-adegan, musik, cahaya, vokal aktor, efek suara, dan objek-objek yang dipergunakan dalam pertunjukan. Lebih jauh dikatakan oleh Barba bahwa dramaturgi hanya bisa diidentifikasi dari suatu teks tertulis otonom (teks drama) dan proses pertunjukan teater yang melibatkan para karakter.

Teori dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia tidak stabil dan merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Disinilah dramaturgis masuk menguasai interaksi tersebut. Dalam

konsep dramaturgis, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui “pertunjukan dramanya sendiri”. Dalam mencapai tujuannya tersebut, manusia mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya tersebut. Seperti pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Kelengkapan ini antara lain memperhitungkan setting, kostum, penggunaan kata (dialog) dan tindakan nonverbal lain. Hal ini tentunya bertujuan untuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan mencapai tujuan. Dengan konsep dramaturgis dan permainan peran yang dilakukan oleh manusia, terciptalah suasana dan kondisi interaksi yang kemudian memberi makna tersendiri. Hal ini sesuai dengan formula 4M dramaturgi yakni : 1). Mengkhayalkan 2). Menuliskan, 3). Memainkan dan 4). Menyaksikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi kualitatif. Menurut Rachmat Kriyantono dalam Teknik Praktis Riset Komunikasi (2007:247) bahwa analisis isi kualitatif adalah suatu analisis isi yang lebih mendalam dan detail untuk memahami produk isi media dan mampu menghubungkannya dengan konteks sosial/realitas yang terjadi sewaktu pesan dibuat. Analisis isi kualitatif bersifat sistematis, analitis tetapi tidak kaku seperti dalam analisis isi kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan dramaturgi Erving Goffman dan etnik situasional Fredrik Barth. Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/ komponen yang diteliti (Arikunto, 2002:234).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu anggota legislatif DPRD Kota Medan dari etnik Tionghoa, termasuk kelompok etnik Tionghoa dan organisasi atau partai yang mengusung anggota legislatif DPRD Kota Medan dari etnik Tionghoa. Untuk memenuhi ketentuan dramaturgi, maka penelitian menetapkan ketentuan sebagai berikut: Semua informan harus mengikuti naskah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan melalui wawancara, terlibat dalam diskusi dan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti demi menjaga etika penulisan identitas diri setiap informan tidak akan disebutkan secara detail melainkan hanya inisialnya saja. Subjek atau informan penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Medan masa bakti 2009- 2014 yang berasal dari etnik Tionghoa. Berdasarkan keterwakilan etnis maka informan yang dipilih adalah 4 (empat) orang yakni 1). Budi (nama samaran), anggota DPRD kota Medan terpilih 2009-2014 dari Partai Demokrat, Dapil 5 yang duduk di Komisi C, 2). Kurniawan (nama samaran), Anggota DPRD Kota Medan terpilih 2009-2014 dari Partai PDIP, Dapil 1 yang duduk di komisi C, 3). Wulandari (nama samaran), Anggota DPRD Kota Medan terpilih 2009-2014 dari Partai Indonesia Baru, Dapil 1 yang duduk di komisi C dan 4). Bunga (nama samaran), anggota DPRD Kota Medan terpilih 2009-2014 dari Partai Indonesia Baru, Dapil 1 yang duduk di komisi C. Sementara itu objek penelitiannya adalah bagian dari perilaku komunikasi politik anggota DPRD Kota Medan yang beretnis Tionghoa yang disebut dengan tindakan yang dikomunikasikan baik berupa atribut etnik, simbol-simbol komunikasi (verbal dan nonverbal), bahasa, setting komunikasi dalam mengungkapkan identitasnya dalam konteks relasi sosial dan politik.

Hasil dan Pembahasan

Motivasi mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Medan khususnya dari etnik Tionghoa memiliki motivasi tersendiri dalam mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD Kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, keempat anggota DPRD Kota Medan dari etnik Tionghoa ini memiliki persamaan dan perbedaan baik dalam tema orasi, strategi komunikasi politik, pendekatan-pendekatan yang dilakukan di panggung depan dan panggung belakang demi memelihara pesan-pesan politiknya, atribut dan simbol-simbol politik yang

dipergunakan dalam menghadapi kelompok konstituennya. Bentuk Komunikasi Politik Anggota DPRD Medan Etnik Tionghoa Pemilu 2009 telah mengukir sejarah tersendiri bagi para politikus etnik Tionghoa yang bertarung memperebutkan kursi legislatif. Beragam strategi dan teknik kampanye mereka lancarkan agar mendapatkan suara sebanyak mungkin. Tidak heran, jika muncul baliho, spanduk, dan di media cetak yang memuat brand dari para calon legislatif. Ada 3 bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh para anggota DPRD Kota Medan dari etnik Tionghoa ketika melakukan orasi politik jelang pemilihan legislatif tahun 2009, yakni : dialog, tatap muka, dan kunjungan.

Penggunaan atribut dalam mewujudkan identitas sosial sangat beragam. Akibat dari keadaan tersebut proses politik yang berlangsung banyak diwarnai lobi-lobi di luar jalur politik. Untuk itu kemampuan komunikasi politik dengan bermacam pendekatannya menjadi hal penting dalam mengagregasi kepentingan individu, partai atau kelompok. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti melihat bahwa dalam melakukan komunikasi politik dengan kelompok etnisnya, biasanya tidak berlangsung dalam situasi formal. Misalnya dalam acara paguyuban sosial warga Tionghoa Indonesia, Lyons Club, Laskar Merah Putih, Taruna Merah Putih, serta berbagai kegiatan bakti sosial. Wahana wahana tersebut merupakan panggung politik yang dimanfaatkan oleh para anggota DPRD Kota Medan khususnya dari kalangan etnis Tionghoa untuk mempertukarkan pesan-pesan komunikasi politik sebagaimana dikemukakan Goffman dengan dramaturgisnya. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penggunaan atribut yang bersifat artifisial oleh para anggota DPRD Kota Medan cukup menonjol.

Pertama, ekspresi identitas melalui pakaian yang dikenakan. Untuk disebut berpenampilan keren anggota DPRD pria kebanyakan mengenakan stelan jas yang baru dengan berbagai asesoris yang menyertainya seperti dasi dan kopiah baru. Sementara anggota dewan yang perempuan selalu tampil “cantik” dengan stelan pakaian resmi jika akan mengikuti rapat-rapat. Pada hari-hari yang lain, sebagian anggota dewan perempuan mengenakan pakaian yang paling trend saat ini, ditambah dengan berbagai atribut kemapanan seperti perhiasan berupa gelang, kalung dan pin, dan brooch. Bahasa dan logat daerah sebagai identitas sosial etnik ciri-ciri lain yang menjadi atribut yang dapat menegaskan identitas seseorang dalam konteks politik yang diperlihatkan oleh para anggota DPRD Kota Medan dari etnik Tionghoa adalah bahasa dan logat daerah. Penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan komunikasi politik lebih banyak dilakukan oleh anggota DPRD yang menganggap diri mereka sebagai etnik asli Tionghoa. Hal ini juga dimungkinkan oleh sifat keeksklusifan etnik Tionghoa.

Penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan komunikasi terutama dalam kaitan lobi dan upaya menyatukan pendapat pengambilan keputusan seringkali dianggap lebih efektif oleh para anggota DPRD yang berasal dari etnik minoritas seperti etnik Tionghoa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nama keluarga (klan) pada pemilihan calon legislatif DPRD Kota Medan tahun 2009 masih menjadi salah satu jaminan keterpilihan menjadi caleg. Misalnya, dengan mengkomunikasikan dirinya berasal dari keluarga Sofyan Tan dengan harapan akan semakin memudahkan dirinya untuk meraih suara kelompok komunitas etnik Tionghoa. Dalam pergaulan sehari-hari masing-masing individu anggota legislatif DPRD Kota Medan, dalam kelompok sosial ini juga memiliki dialek dan gaya bertutur yang kemudian mewujud dalam gaya retorika yang khas dalam bahasa keseharian. Dalam interaksi kehidupan sehari-hari gaya retorika bahasa terkait dengan budaya dan kelas sosial serta lingkungan yang menjadi arena kehidupan publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang komunikasi politik etnik Tionghoa dalam mengungkapkan identitas relasi sosial dalam politik, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya para anggota DPRD Kota Medan periode 2009-2014 dari etnik Tionghoa memiliki motivasi yang sama dalam mencalonkan diri, yakni untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan etnik Tionghoa. Bentuk komunikasi politik yang umum dipergunakan oleh para anggota DPRD Kota Medan periode 2009-2014 adalah dialog, tatap muka dan kunjungan. Dalam

menerapkan strategi dramaturgi dalam pengelolaan panggung, terdapat beragam atribut dan simbol simbol yang menjadi pembeda untuk mengidentifikasi identitas etnis Tionghoa sebagai anggota DPRD Kota Medan.

Atribut yang bersifat artifisial seperti pakaian, perhiasan, kepemilikan benda-benda elektronik dan sarana komunikasi terkini, kendaraan serta gaya hidup menandakan struktur ekonomi dan kemampuan anggota dewan. Sementara simbol-simbol yang khas menunjukkan identitas etnik seorang anggota dewan yang sering dijadikan pembeda komunikasi politik adalah bahasa daerah yang digunakan, logat atau aksen, falsafah hidup dan adat istiadat yang masih dipertahankan serta makanan khas. Identifikasi identitas etnik yang dilakukan para anggota DPRD Kota Medan yang berasal dari etnik Tionghoa adalah sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Pada saat tertentu ketika berinteraksi dengan sesama etnik, maka identitas yang melekat seperti asal suku dan agama dengan tegas ditonjolkan. Hal ini berkaitan dengan upaya pengelolaan kesan (*impression management*) anggota DPRD dalam mencapai kepentingan mereka baik kepentingan pribadi, kelompok, partai asal dan atas nama kepentingan rakyat. Dalam hal penggunaan identitas etnik, terdapat ciri yang menunjukkan apa yang disebut Barth sebagai etnik situasional dan manipulasi identitas etnik.

Daftar Pustaka

- Barba, Eugenio (2005). *The Paper Canoe*, London: Routledge
- Barth, Frederik. (2001). *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Terjemahan Nining I Susilo Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Idrus Muhammad. (2009), *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, edisi kedua, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kriyantono, Rachmat. (2007). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media , Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana, Deddy. (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- _____, (2002). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nimmo, Dan. (2006). *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. (2001). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Sastroadmodjo, Sudijono. (2005). *Perilaku Politik*, Semarang; IKIP Semarang Press
- Surbakti Ramlan. (2009). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grasindo
- Suryadinata, Leo. (2002). *Negara dan Etnik Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES

